

**PENGARUH TRANSPARANSI AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Andika Subandra<sup>1</sup>, Usdeldi<sup>2</sup>, Eri Nofriza<sup>3</sup>**

**Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, Indonesia**

*E-mail: andikasubandra1999@gmail.com*

**Abstract**

*Village financial management is an overall activity that includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability for village funds. This study aims to determine the effect of transparency, accountability, and community participation on village financial management. The sample of this research is the entire community in Pebenaan Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency. This type of research is descriptive quantitative research. The sampling method used purposive sampling, namely random sampling based on certain criteria for each member of the population to be a sample so as to produce 98 respondents. The data was obtained by distributing questionnaires to the residents of Pebenaan Village. Hypothesis testing in this study uses Multiple Linear Regression Analysis, Classical Assumption Test, and Hypothesis Testing with SPSS version 21 tool. The results show that Transparency has no effect on Village Financial Management, Accountability and Community Participation affect Village Financial Management. Based on the results of the Coefficient of Determination, it is found that Transparency, Accountability and Community Participation simultaneously affect village financial management with a value of 75.50%, while the other 24.50% are influenced by other variables outside of this study.*

**Keywords:**

*Transparency, Accountability, Community Participation, Village Financial Management*

## Pendahuluan

Desa merupakan suatu lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintahan. Berlandaskan perannya tersebut, maka diterbitkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berhubungan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda roda pemerintah berjalan dengan optimal (Dewi & Adi, 2019) Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa diharapkan bisa menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya sudah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan desa (Thoyib et al., 2020).

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**  
**APB Desa**  
**Desa Pebenaan Tahun 2021**

<b>Pendapatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa</b>
Pad Desa	466.929	466.929	-
Dana Desa	916.157.000	916.157.000	-
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	15.876.608	15.876.608	-
Alokasi Dana Desa	792.987.000	792.987.000	-
Bantuan Keuangan Provinsi Riau	100.000.000	100.000.000	-
Pendapatan Lain-Lain Yang Sah	507.552	507.552	-
<b>Jumlah Total Pendapatan</b>	<b>1.825.995.089</b>	<b>1.825.995.089</b>	-

Sumber data kantor : Desa Pebenaan

Dari tabel 1.1, bisa kita lihat bahwa dana yang cukup besar yakni 1.825.995.089, oleh karna itu sangat rawan terjadi penyelewengan yang mengarah pada korupsi bagi aparat desa itu sendiri. Mengenai data yang ada di beberapa daerah khususnya Indonesia ada 215 kepala desa yang terseret kasus korupsi dana desa. Dengan demikian perlu diketahui sejauh mana transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa dan sejauh mana peran dari aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam program keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan semua kegiatan yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan desa yang bisa dipertanggungjawabkan. Mengelola keuangan desa seharusnya berlandaskan atas asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif juga dijalankan agar tertib dan disiplin terhadap anggaran. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya (Ida Yesinia, 2019).

Transparansi merupakan salah satu aspek yang berlandaskan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terbentuknya tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan. Untuk memegang dan mencapai prinsip ini, oleh karna itu harus selalu diterapkan dalam memecahkan setiap masalah pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas merupakan asas yang memutuskan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa saat ini khususnya pada Desa Pebenaan, yakni tidak adanya pengadaan atau penjadwalan musyawarah tahunan yang diadakan oleh pemerintah desa Pebenaan mengenai perencanaan maupun pengalokasian dana yang seharusnya pemerintah desa lebih mengutamakan musyawarah desa sehingga masyarakat dapat memberikan arahan secara langsung mengenai dana desa.

Tentunya dengan lebih adanya keterbukaan pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa dan bisa lebih tepat sasaran dalam menggunakan dana desa tersebut khususnya pada Desa Pebenaan. APBDDesa dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Amsyal et al., 2021).

Berdasarkan fenomena gapdan *research gap* yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir).**

## Landasan Teori

Teori agensi adalah konsep yang menggambarkan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* merupakan pihak yang memberikan arahan kepada pihak lain yaitu *agents*, agar menjalankan semua kegiatan atas nama *principals* dalam ketentuannya dalam pengambil keputusan. Hubungan keagenan adalah kontrak yang mana memiliki satu atau lebih orang (*principals*) memberi arahan orang lain (*agents*) untuk melaksanakan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik bagi *principal*. Implikasi dari teori keagenan dengan penelitian ini yaitu guna

mengetahui eksistensi perangkat desa sebagai lembaga pengabdian masyarakat yang dipercaya masyarakat untuk menerima dan mendengarkan aspirasi rakyat, melayani masyarakat sebaik mungkin, dan mampu mempertanggung jawabkan segala hal yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, seluruh tujuan pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat dapat terwujud secara optimal. Pemerintah yang baik dapat dilihat dari baik tidaknya akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat desanya (A. A. A. Putri et al., 2021).

## Transparansi

Transparansi adalah memberikan suatu informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjamin akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut: (Kurniawan, 2019).

## Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan ukuran yang memperlihatkan apakah kegiatan birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. Dengan kata lain, bahwa akuntabilitas artinya kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik: (Izzah, 2018)

## Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat pada proses pengelolaan keuangan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta tahap evaluasi yang dilaksanakan serta mengambil bagian dalam bentuk aktivitas masyarakat (Siregar, 2020).

## Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai pada anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (Tedi et al., 2020).

## Metodologi

### Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang nantinya akan menjadi bahan penelitian yang memiliki ciri berupa karakteristik yang sama. Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh Masyarakat pada Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten, Indragiri Hilir yang jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 1.147 dengan jumlah penduduk 4.100 jiwa.

### Sampel

Sugiyono menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi contoh, untuk menjadi bahan penelitian dengan harapan contoh yang diambil tersebut bisa menjadi perwakilan dari populasinya, Adapun tehnik penarikan sampel untuk penelitian memakai teknik purposive sampling bersumber pada kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

Adapun untuk menentukan jumlah sampel yaitu menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{N(D)^2 + 1}$$

keterangan :

n : Ukura Sampel

N : Jumlah Populasi

D : 10%

$$\begin{aligned} n &= \frac{4.110}{1+4.110(0,1)^2} \\ &= \frac{4.110}{1+4.110(0,01)} \\ &= \frac{4.110}{1+41} \\ &= \frac{4.110}{42} \end{aligned}$$

= 97,61 Dibulatkan menjadi 98 Responden.

Berdasarkan Rumus Slovin, didapat hasil pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, maka sampel penelitian ini sebanyak 98 Responden.

## Metode Pengolahan dan Analisis Data

Karena dalam penelitian ini data yang digunakan hasil dari kuesioner sehingga dalam teknik analisis datanya harus dilakukan uji Validitas untuk mengukur apakah pernyataan yang digunakan dalam kuesioner layak layak atau tidak untuk mengukur variabel yang diteliti dan uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui seberapa besar nilai konsistensi pengukuran apabila pengukuran dilakukan lebih dari satu kali. Adapun model penelitian dirumuskan sebagai berikut ini:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + Bx_4 + e$$

Keterangan:

Y :Pengelolaan keuangan desa

a :Konstanta

b :Koefisien regresi

X1 :Transparansi

X2 :Akuntabilitas

X3 :Partisipasi Masyarakat

e :Error term

## Hasil dan Pembahasan

### Uji Valid (Validitas)

Konsistensi alat ukur yang digunakan dalam uji validitas memiliki kriteria apabila suatu indikator dinyatakan valid dengan syarat  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa seluruh item memiliki nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha = 0.05$ , maka alat ukur dapat dinyatakan valid dan layak untuk dilanjutkan ke pengujian realibilitas.

### Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel diatas dinyatakan reliabel dengan hasil perhitungan memiliki koefisien keandalan (*reliabilitas*) diatas  $>0,70$  atau lebih besar dari nilai r tabel yang dihasilkan.

### Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

Nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar  $0,075 > 0,05$ . maka hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal dan layak dilanjutkan untuk dilakukan pengujian kualitas data selanjutnya.

### Uji Multikolinieritas

Nilai *Tolerance* sebesar 0,363, 0,282, dan 0,519 lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF sebesar 2.753, 3.543, dan 1.928 lebih kecil dari 10 artinya model regresi dikatakan bebas dari masalah multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik tersebut tidak membentuk pola melebar, menyempit dan atau bergelombang, namun dari hasil diatas terlihat bahwa titik-titik tersebut menyebar tidak beraturan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

$Y=1.199+0,21X_1+0,425X_2+ 0,513X_3+e$   
Persamaan diatas memiliki makna yaitu :

- Nilai Konstanta = 1.199  
Memiliki arti apabila variable transparansi (X1), akuntabilitas(X2), partisipasi masyarakat (X3) dalam kualitas laporan keuangan = 0, maka pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 1,199.
- Transparansi (X1)  
Nilai koefisien regresinya positif yakni 0,021 yang artinya jika terjadi peningkatan pada tranparansi sebanyak 1 % maka kualitas pengelolaan keuangan desa juga meningkat sebesar 0,021.
- Akuntabilitas Memiliki nilai koefisien regresi positif yakni sebesar 0,425 yang artinya, jika terdapat peningkatan pada variable akuntabilitas sebanyak 1 %, maka pengelolaan keuangan desa juga mengalami peningkatan sebesar 0,425. Pengelolaan keuangan desa (X3)  
Memiliki nilai koefisien regresi positif yakni sebesar 0,513 yang artinya, jika terdapat peningkatan pada variable

pengelolaan keuangan desa sebanyak 1 %, maka pengelolaan keuangan desa juga mengalami peningkatan sebesar 0,513.

### Uji parsial (uji t)

- Nilai (sig) untuk variabel variabel transparansi (X1) sebesar 0,785 yang berarti lebih besar dari nilai  $\alpha$  0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa Desa Pebanaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Nilai (sig) dari variabel akuntabilitas (X2) sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa Desa Pebanaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Nilai (sig) dari variabel partisipasi masyarakat(X3) sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa Desa Pebanaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

### Uji –F (Simultan)

diperoleh hasil uji F (Anova) nilai signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi (X1) akuntabilitas (X2) dan partisipasi masyarakat (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa(Y).

### Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

Nilai koefisien determinasi atau *r square* sebesar 0.756 hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan variabel akuntabilitas dan transparansi untuk mempengaruhi

kepercayaan masyarakat adalah sebesar 0.756 atau 75,50 % sisanya 24,50 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh transparansi (X1) terhadap pengelolaan keuangan desa

Hasil uji  $t$  pada variabel transparansi(X1) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) pada Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil perhitungan uji parsial diperoleh hasil  $t$  hitung 0,274 dengan  $sig$  sebesar  $0,785 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Secara teori sebenarnya transparansi harus berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, namun secara pengalaman empiris dilapangan masyarakat khususnya pada Desa Pebenaan tidak ingin tahu persoalan perencanaan, pelaksanaan maupun pengelolaan keuangan desa. Oleh karna itu sesuai dengan uji statistik yang telah dilakukan sejalan dengan keadaan yang ada dilapangan. Sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa Pebenaan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini didukung oleh Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani. Jurnal yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut): (Sukmawati & Nurfitriani, 2019).

### 2. Pengaruh akuntabilitas (X2) terhadap pengelolaan keuangan desa

Hasil uji  $t$  diperoleh  $t$  hitung sebesar 4.903 dengan  $sig$  sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya akuntabilitas (X2) berpengaruh signifikan terhadap

pengelolaan keuangan desa (Y) pada Desa Pebenaan. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa: “Ada pengaruh positif akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) pada Desa Pebenaan”, diterima atau terbukti kebenarannya. Kesimpulan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengujian variabel akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa semakin bertanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola laporan keuangan maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Andriani yang menunjukkan bahwa Akuntabilitas memberikan pengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Luk Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa: (Andriani, 2019).

### 3. Pengaruh partisipasi masyarakat (X3) terhadap pengelolaan keuangan desa

Hasil uji  $t$  diperoleh  $t$  hitung sebesar 6.738 dengan  $sig$  sebesar  $0,000 < 0,05$  partisipasi masyarakat (X3) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) pada Desa Pebenaan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa: “Ada pengaruh yang signifikan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) pada Desa Pebenaan”, diterima atau terbukti kebenarannya. Kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengujian variabel partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa keikutsertaan partisipasi masyarakat dalam mengelola keuangan desa maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini didukung oleh Mutia andriani partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa: (Andriani, 2019)

#### 4. Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan hasil uji f yang telah dilakukan dari variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat adalah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Pebenaan. Hal ini dapat dilihat dari tabel uji f yang mana nilai signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05.

## Kesimpulan

1. Transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan desa pada Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan desa pada Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan desa pada Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

## Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran yang mungkin dapat diberikan peneliti untuk beberapa pihak yang mungkin saja dapat digunakan sebaik-baiknya, diantaranya :

### 1. Bagi Pemerintah Desa

Untuk Pemerintah Desa agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, serta dapat memberikan informasi muswarah desa, dan juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan keuangan desa maupun program yang akan dilaksanakan di desa tersebut sehingga masyarakat dapat lebih mempercayai pemerintah desa dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa tersebut, sebab dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat meningkatkan keberhasilan program-program yang akan dilaksanakan didesa tersebut.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti masalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa dapat menggunakan uji lain dan menambahkan variabel-variabel yang sekiranya dapat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa serta memperluas sampel dan objek penelitian sehingga hasil selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih untuk peneliti, pihak lainnya.

## Daftar Referensi

- Amsyal, R., Fitri, C. D., & Farma, J. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya). *EKOBIS SYARIAH*, 4(1), 11-27.
- Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa*, 1-13.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02).
- Ida Yesinia, N. (2019). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)* [PhD Thesis]. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Izzah, H. (2018). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan*

- Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Kurniawan, P. A. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)* [PhD Thesis]. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Petalongan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 2(2), 258-280.*
- Siregar, M. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). Jurnal Ilmiah Kohesi, 4(2), 59-59.*
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan Umkm, 2(1), 52-66.*
- Tedi, K. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar). Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi, 9(1), 18-27.*
- Thoyib, M., Satria, C., Septiana, S., & Amri, D. (2020). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 5(2), 13-30.*